

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang mengalami perubahan, baik kota-kota besar maupun daerah-daerah belakangnya (*hinterland*), dalam hal ini adalah pedesaan. Pengembangan daerah pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kehidupan sosial ekonomi penduduk, karena itu pola pengembangannya diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat desa dengan cara memodernisasikan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pendapatan pedesaan.

Desa diibaratkan sebuah sumber yang memercikkan “segala potensi alam” yang dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Petani berharap banyak dari alam, penambang berburu isi bumi dari alam, pelaut (nelayan) pergi berlayar mendapatkan hasil tangkapan dari alam. Warga kota mengharapkan hasil alam dari desa (dari sektor pertanian) berupa bahan makanan (*food*) dan bahan mentah (*raw material*), dan semua bermula dari wilayah desa dan pesisir (Hasid, 2010). Di luar dari segenap urgensi keberadaan dan potensi alam yang dimilikinya, desa masih identik dengan ketertinggalan, karena akses dasar masih begitu minim, sehingga membuat orang-orang tak berdaya untuk mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya (Sajogyo dan Pudjiwati, 1983).

Pengembangan daerah perdesaan diharapkan mampu menggeser kedudukannya dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya manusia yang beragam, suku, agama, tradisi, budaya serta bahasanya merupakan aset sosio kultural geografis yang penting dikembangkan sebagai aset kearifan lokal dalam pembangunan wilayah dan pengelolaan sumber daya serta lingkungan (Sugiharto,2007).

Secara umum di Indonesia dan Sumatera Utara pada khususnya, dapat dilihat bahwa kondisi wilayah perdesaan memang masih jauh tertinggal dari wilayah perkotaan baik dari kualitas infrastruktur, komunikasi dan informasi, ketersediaan fasilitas umum serta pelayanan publik. Selain itu terjadinya penyebaran fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak merata atau hanya tersedia di beberapa desa semakin memperburuk kondisi desa-desa yang tertinggal. Kondisi ini mengakibatkan lahirnya berbagai kesenjangan baik dari aspek kesejahteraan, pendidikan, wawasan, informasi dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan seiring waktu masyarakat sangat membutuhkan adanya peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan, kualitas pendidikan dan layanan lainnya yang tidak didapat secara layak di desanya, sehingga mendorong mereka untuk mendekati perkotaan atau berpindah ke wilayah perkotaan.

Dalam Pembangunan suatu wilayah, perencanaan adalah suatu hal yang utama sebab dengan perencanaan yang tepat akan menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri. Perencanaan yang tepat adalah sebuah perencanaan yang dibuat atas dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah tersebut. Perencanaan juga akan menjadi bahan dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan yang mendukung perencanaan tersebut.

Konsep perencanaan wilayah merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan yang dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan, permasalahan, ciri dan karakteristik dari masing-masing daerah/wilayah yang menuntut adanya campur tangan pihak pemerintah pada tingkat wilayah. Perencanaan wilayah dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan dimasing-masing wilayah dan mengupayakan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Peran utamanya adalah mengatasi secara langsung persoalan-persoalan yang berkenaan dengan pembangunan ditingkat wilayah.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara dan berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Asahan berada pada $2^{\circ}03'00''$ LU - $3^{\circ}10'00''$ LU, $99^{\circ}01'$ BT - $100^{\circ}00'$ BT dengan ketinggian 0 – 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 371.945 Ha ($3.719,45 \text{ km}^2$) yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 176 Desa/Kelurahan Definitif. Konsentrasi pembangunan perekonomian Kabupaten Asahan masih tetap mengarah kepada pembangunan pertanian, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang perekonomian lainnya (<http://pemkab-asahan.go.id>) (diakses pada tanggal 21 November 2013 pukul 22:47 WIB).

Kabupaten Asahan merupakan salah satu sentra perkebunan di Sumatera Utara. Melihat hal tersebut seharusnya Kabupaten Asahan mampu mewujudkan pembangunan yang merata di setiap wilayah. Akan tetapi, hal tersebut sulit untuk terwujud karena adanya kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Asahan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, penumbuhan usaha agroindustri di pedesaan dan penguatan kelembagaan usaha ekonomi produktif yang dikarenakan

terbatasnya anggaran pembangunan. (<http://pemkab-asahan.go.id>) (diakses pada tanggal 21 November 2013 pukul 22:47 WIB).

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan adalah Kecamatan Buntu Pane, memiliki luas wilayah 15.719 Ha (157,19 Km²), dan ketinggian 16-72 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kecamatan Buntu Pane terbagi atas delapan (8) desa dan satu (1) kelurahan, yaitu Desa Lestari, Desa Buntu Pane, Desa Ambalutu, Desa Prapat Janji, Desa Sionggang, Desa Karya Ambalutu, Desa Perkebunan Sei Silau, Desa Mekar Sari dan Kelurahan Sei Silau Timur. (Kecamatan Buntu Pane dalam angka 2013)

Desa dan kelurahan yang terdapat di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan merupakan desa yang mulai berkembang apabila dilihat dari perkembangannya dan ketersediaan pelayanan umum serta sarana dan prasarana yang ada. Namun hal ini tidak dialami oleh semua desa, dalam arti pembangunan desa di Kecamatan Buntu Pane ini masih belum merata dan hanya terpusat pada desa-desa tertentu saja, hal ini tentu saja secara kasat mata akan menunjukkan adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan yang terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Katalog BPS Kecamatan Buntu Pane dalam angka Tahun 2013 menunjukkan bahwa seluruh desa yang ada di Kecamatan Buntu Pane termasuk klasifikasi desa swasembada atau desa yang sudah tergolong maju, akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada penelitian pendahuluan menunjukkan adanya desa-desa yang masih terpencil dan memiliki akses mobilitas yang tidak memadai seperti kondisi jalan yang buruk dan tidak bisa dilalui sepanjang tahun ditambah jauhnya jarak yang harus ditempuh masyarakat desa untuk menuju ke pusat fasilitas dan tidak tersedianya

sarana dan prasarana umum di desa-desa terpencil seperti puskesmas atau klinik, sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah serta masih adanya desa yang belum mendapat pasokan listrik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tipologidesa-desa di KecamatanBuntu pane berdasarkan tingkat perkembangannya serta membandingkan data tipologi desa yang telah diperoleh dengan hasil penelitian pengklasifikasian tipologi desa di Kecamatan Buntu Pane ini.

Tipologi desa merupakan salah satu cara untuk mengenal desa berdasarkan karakter desa menurut potensinya. Menentukan tipologi desa di Kecamatan Buntu Pane ini dilakukan agar mengetahui perbedaan tipe-tipe desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Dimana tipologi desa dalam kaitannya dengan pembangunan merupakan indikasi tahap pembangunan desa, sehingga penelaahan tipologi desa menjadi hal yang penting untuk mengetahui potensi desa bagi keperluan pengembangan wilayah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah; (1) termasuk kedalam tipologi apa saja desa-desa yang ada di Kecamatan Buntu Pane (2) bagaimanakah tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Buntu Pane (3) apa saja potensi dan kendala yang di hadapi dalam perkembangan desa-desa di Kecamatan Buntu Pane (4) apa sajakah faktor penyebab perbedaan tipologi desa di Kecamatan Buntu Pane (5) bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi desa yang terjadi di Kecamatan Buntu Pane.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang tercakup dalam identifikasi, maka penelitian ini dibatasi pada klasifikasi tipologi desa di Kecamatan Buntu Pane, termasuk di dalamnya kelurahan sebagai wilayah setingkat desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana klasifikasi tipologi desa yang ada di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi tipologi desa di Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk melengkapi ilmu pengetahuan yang terkait dengan kewilayahan, dan pengembangan wilayah pedesaan di Kecamatan Buntu Pane.
2. Menambah pengetahuan penulis dalam mempelajari serta mengetahui tentang pengembangan wilayah.
3. Sebagai bahan pertimbangan kepada penelitian yang selanjutnya.